

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR PUTUSAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Tipe Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	11

BAB II	KEWENANGAN KEPOLISIAN MELAKUKAN UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN.....	12
2.1	Kepolisian Sebagai Penyelidik dan Penyidik Dalam Hukum Acara Pidana.....	12
2.2	Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Upaya Paksa Penggeledahan dan Penyitaan	24
2.2.1	Penggeledahan.....	24
2.2.2	Penyitaan	40
BAB III	IMPLIKASI PELAKSANAAN UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN OLEH KEPOLISIAN SECARA MELAWAN HUKUM	47
3.1	Barang Bukti Dalam Hukum Acara Pidana	47
3.2	Prosedur Perolehan Barang Bukti Dalam Hukum Acara Pidana	52
3.3	Keabsahan Barang Bukti Yang Didapat Secara Melawan Hukum	58
3.4	Anotasi Putusan	61
3.4.1	Anotasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010.....	61
3.4.2	Anotasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Pid.Sus/2012.....	66
BAB IV	PENUTUP.....	78
4.1	Kesimpulan.....	78
4.2	Saran.....	79

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 15.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Tahun 2009 Nomor 150.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Tahun 2009 Nomor 311.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Tahun 2010 Nomor 204.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Berita Negara Tahun 2012 Nomor 686.

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010

Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Pid.Sus/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014